

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

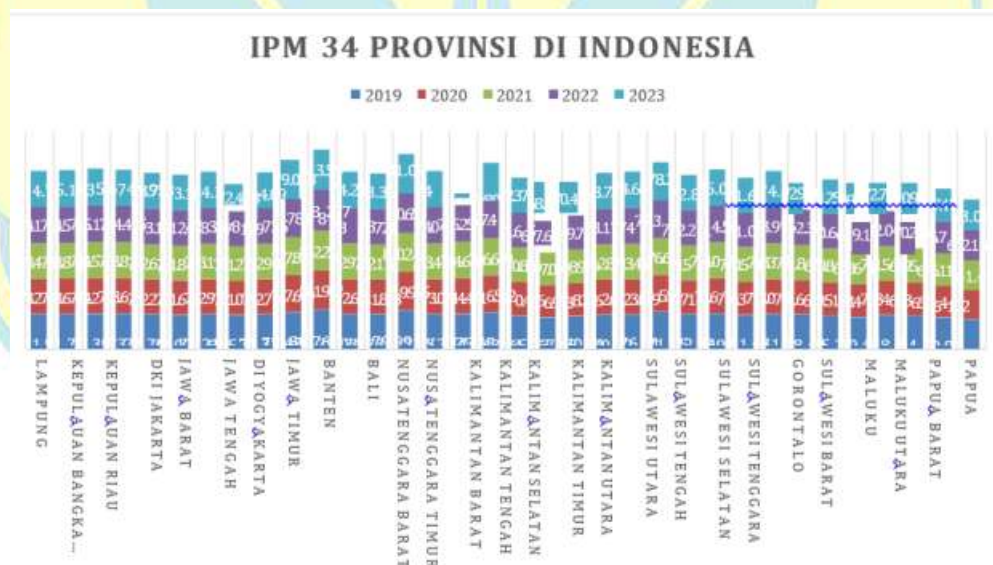
Tingkat keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga oleh kualitas kesehatan warganya, tingkat pendidikan, dan kesejahteraan. Secara global, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur standar hidup masyarakat. Penelitian ini mengkaji kekuatan suatu negara berdasarkan tiga pilar utama: tingkat kehidupan yang layak, akses terhadap pengetahuan, serta tingkat kesehatan dan harapan hidup.

Menurut Nabila Fachrani Putri & Lina Suherty (2024) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan peningkatan taraf hidup masyarakat umum. Penilaian IPM didasarkan pada tiga faktor utama: taraf hidup yang layak, tingkat pendidikan, serta kesehatan dan kesejahteraan. Tinggi atau rendahnya angka IPM memungkinkan kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi tolok ukur kemajuan suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi global merupakan pendorong utama pembangunan manusia berkat meningkatnya pendapatan, yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat umum untuk berinvestasi di bidang kesehatan dan pendidikan. Meskipun demikian, pertumbuhan yang tidak inklusif seringkali hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, sementara sisanya terabaikan. Hal ini menimbulkan paradoks pertumbuhan,

yaitu situasi di mana pertumbuhan ekonomi terjadi namun standar hidup masyarakat secara umum tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Setyowati et al. (2024)

Tren pembangunan manusia di kawasan Asia Tenggara menunjukkan hal serupa. Negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun, namun masih tertinggal dalam pencapaian IPM dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand World Bank (2023). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akses yang tidak memadai terhadap layanan kesehatan dan pendidikan menyebabkan masyarakat umum tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya hasil dari pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1 1 Data IPM 34 Provinsi di Indonesia 2019-2023

Sumber : BPS (2023)

Pada abad terakhir, pembangunan manusia di Indonesia telah menunjukkan tren positif. Secara keseluruhan, grafik IPM di seluruh provinsi terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan tingkat pencapaian dan laju pertumbuhan yang bervariasi. Hal ini menyoroti kemajuan pembangunan nasional sekaligus ketimpangan pembangunan antarprovinsi.

Provinsi-provinsi di wilayah perbatasan Indonesia, seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten, memiliki nilai IPM yang secara umum lebih tinggi daripada provinsi-provinsi di wilayah Timur. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkaitan erat dengan kualitas pembangunan manusia. Di sisi lain, wilayah-wilayah di Timur seperti Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur masih memiliki IPM yang relatif rendah, meskipun mereka memiliki potensi untuk meningkatkannya.

Pandemi COVID-19 semakin menegaskan pentingnya ketahanan pembangunan manusia. UNDP (2022) mencatat bahwa untuk pertama kalinya dalam tiga dekade, IPM dunia menurun dua tahun berturut-turut akibat pandemi. Indonesia juga mengalami perlambatan signifikan, di mana IPM hanya naik 0,02 poin pada tahun 2020 peningkatan terendah dalam 10 tahun terakhir BPS (2024). Pandemi tidak hanya menekan ekonomi, tetapi juga menurunkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan manusia sangat bergantung pada stabilitas ekonomi dan sosial.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri selama periode 2019–2023 mengalami fluktuasi signifikan. Pada tahun 2019 ekonomi tumbuh sebesar 5,02%, namun menurun drastis menjadi -2,07% pada tahun 2020 akibat pandemi, sebelum kemudian pulih menjadi 5,31% pada tahun 2022 dan 5,05% pada tahun 2023 BPS (2024). Dinamika ini tentu memengaruhi kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang menjadi komponen utama IPM. Dengan kata lain, kondisi ekonomi makro memiliki keterkaitan langsung terhadap tingkat pembangunan manusia.



Gambar 1 2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber : BPS (2023)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia secara keseluruhan cenderung meningkat sejak triwulan I-2019 hingga triwulan I-2023. Pergerakan garis biru pada grafik memperlihatkan dinamika perekonomian nasional pada periode sebelum, saat, dan sesudah pandemi COVID-19.

Sebelum pandemi di tahun 2019, kondisi ekonomi relatif stabil di kisaran 5% per tahun berkat ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik. Namun, tekanan pandemi

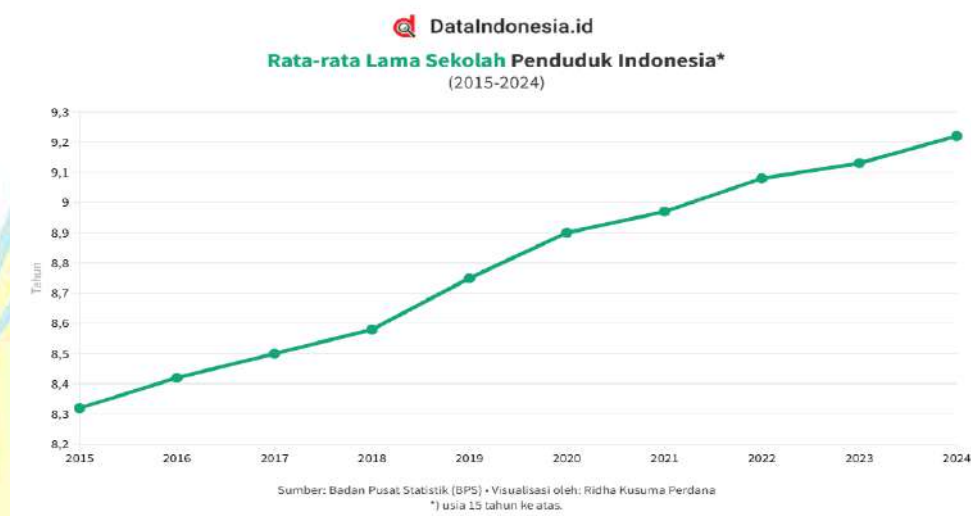
COVID-19—yang diiringi pembatasan kegiatan (lockdown), penurunan ekspor, serta merosotnya daya beli masyarakat—memicu kontraksi tajam hingga pertumbuhan ekonomi anjlok ke titik terendahnya di kisaran -5% pada triwulan II-2020.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak sekadar bertumpu pada lonjakan output dan pendapatan nasional, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia hasil bentukan pendidikan. Sebagai pilar strategis pembangunan, pendidikan berperan penting dalam mendongkrak produktivitas tenaga kerja, memicu inovasi, dan memperkuat daya saing wilayah. Tanpa sokongan pendidikan yang memadai, pertumbuhan ekonomi berisiko berjalan tidak inklusif serta gagal meratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ariska Ranadhani et al. (2021) Pendidikan adalah bentuk investasi modal manusia (*human capital investment*) jangka panjang yang berfungsi meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pengayaan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas kerja. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengaktualisasikan dirinya, meraih peluang kerja yang lebih baik, serta meningkatkan taraf penghasilan yang bermuara pada perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia sangat terkait dengan pendidikan. Pendidikan adalah cara utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi, kemajuan teknologi, dan tuntutan pasar tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Menurut Siti Rama Hasibuan et al. (2023) salah satu komponen penting dari Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), yang ditunjukkan oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Peningkatan indikator pendidikan menunjukkan bahwa kualitas intelektual masyarakat telah meningkat. Pada akhirnya, ini akan membawa individu ke kesempatan kerja yang lebih baik, gaji yang lebih besar, dan kesejahteraan yang lebih baik.



Gambar 1 3 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Indonesia Tahun 2015-2024

Sumber : BPS (2024)

Data periode 2015–2024 menunjukkan tren peningkatan konsisten pada rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia. Kenaikan ini memperlihatkan semakin luasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal, sekaligus membuktikan efektivitas program pemerintah seperti wajib belajar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan intervensi pendidikan berbasis afirmasi.

Perkembangan positif selama satu dekade terakhir ini menandakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara umum. Selain itu, RLS berperan sebagai

salah satu komponen utama penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mendampingi Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Umur Harapan Hidup (UHH) sehingga kenaikannya berdampak langsung pada dorongan peningkatan IPM nasional.

Kemiskinan menjadi salah satu tantangan mendasar dalam pembangunan Indonesia, baik di level nasional maupun daerah. Masalah ini tidak hanya berkutat pada ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mencakup terbatasnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi. Lantaran bersifat multidimensi, kemiskinan berdampak luas terhadap mutu kehidupan masyarakat sekaligus keberlanjutan pembangunan.

Menurut Martono Hadi Saputro (2022), Kemiskinan memegang peranan krusial dalam menentukan kualitas pembangunan manusia. Akses terhadap pendidikan yang layak serta layanan kesehatan yang memadai kerap terhalang oleh tingginya angka kemiskinan, sehingga berdampak langsung pada penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, kondisi ekonomi yang terbatas mempersulit masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi dan produktivitas mereka, yang pada akhirnya bermuara pada rendahnya mutu SDM.



Gambar 1 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2019 - Maret 2023

Sumber : BPS (2024)

Dinamika tingkat kemiskinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 serta proses pemulihan ekonomi setelahnya. Pada masa pra-pandemi (September 2019), angka kemiskinan berada di level 9,22% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 24,78 juta jiwa.

Kondisi tersebut memburuk saat pandemi melanda; terhentinya roda ekonomi, merosotnya pendapatan rumah tangga, dan meningkatnya kerentanan sosial memicu lonjakan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan naik menjadi 9,78% (26,42 juta orang) pada Maret 2020, hingga akhirnya menyentuh puncaknya sebesar 10,19% (27,55 juta orang) pada September 2020.

Seiring berjalannya pemulihan ekonomi nasional, jumlah maupun persentase penduduk miskin perlahan-lahan mulai menyusut. Angka kemiskinan turun menjadi 26,16 juta jiwa (9,54%) pada Maret 2022, lalu berlanjut melandai hingga menyentuh

25,90 juta jiwa (9,36%) pada Maret 2023. Tren positif ini menandakan bahwa pemulihan aktivitas ekonomi serta program perlindungan sosial yang dijalankan efektif menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Periode tahun 2019–2023 menjadi periode yang krusial untuk dianalisis karena merangkum fase pra-pandemi, krisis akibat COVID-19, hingga masa pemulihan ekonomi di Indonesia. Meski roda perekonomian nasional mulai bangkit, dampak pandemi masih membayangi kualitas sumber daya manusia akibat tekanan berat pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Situasi ini mengundang urgensi untuk mengkaji sejauh mana pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan angka kemiskinan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada periode tersebut.

Tantangan utamanya adalah melihat apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar bisa memperbaiki kualitas hidup masyarakat, atau justru malah terganjal oleh masalah kemiskinan dan pendidikan yang belum memadai. Pandemi makin memperparah keadaan karena melebarkan jurang kesenjangan dan membuat banyak orang makin rentan secara ekonomi. Jika masalah kemiskinan ini dibiarkan, kemajuan IPM bisa ikut tertahan. Karena itu, arah pembangunan tidak boleh cuma mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga harus fokus pada kesejahteraan warga dan penyediaan lapangan kerja.

Di Indonesia, hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi biasanya menjadi fokus penelitian. Menurut penelitian Maya Safitri & Rahmawati (2025) , pertumbuhan ekonomi yang tidak merata berpotensi menurunkan efisiensi pengentasan kemiskinan. Akibatnya, manfaat pembangunan tidak dirasakan secara merata oleh

seluruh masyarakat. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap peningkatan IPM. Namun demikian, penelitian yang mengkaji pengaruh kemiskinan terhadap IPM secara bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran pasca-pandemi masih relatif terbatas.

Menurut Damara et al. (2025) penelitian menunjukkan bahwa IPM, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan terkait erat. Namun, jumlah penelitian yang memasukkan kemiskinan sebagai faktor utama dalam menilai pembangunan manusia, terutama setelah pandemi, masih sedikit. Selain itu, metode data panel antarprovinsi belum digunakan dalam sebagian besar penelitian sebelumnya. Metode ini memungkinkan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara bersamaan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, menunjukkan hasil yang simpang siur mengenai dampak pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ada riset yang menyimpulkan bahwa ekonomi dan pendidikan mendorong kenaikan IPM sementara kemiskinan menurunkannya, tetapi ada juga studi yang menemukan pengaruhnya tidak signifikan atau berbeda-beda di tiap daerah. Di sisi lain, belum banyak penelitian yang menguji ketiga faktor ini secara bersamaan memakai data panel dari seluruh provinsi di Indonesia pascapandemi (2019–2023). Alasan inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan, guna melengkapi celah tersebut lewat analisis yang lebih utuh dan mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2019–2023?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2019–2023?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2019–2023?
4. Bagaimana pengaruh secara simultan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2019–2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2019–2023.
2. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2019–2023.
3. Menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2019–2023.
4. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat kemiskinan secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2019–2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, terutama yang berfokus pada isu pembangunan manusia. Hasil temuan dalam studi ini dapat memperkaya bukti-bukti empiris mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan saling memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di samping itu, penelitian ini juga berfungsi untuk menguji sekaligus memperkuat relevansi teori modal manusia (*human capital theory*) dan pendekatan kapabilitas (*capability approach*) dalam melihat realitas pembangunan manusia di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pembangunan manusia. Temuan penelitian ini dapat membantu pihak terkait dalam menentukan strategi kebijakan yang lebih efektif, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta menurunkan tingkat kemiskinan guna mendorong peningkatan IPM di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga terkait dalam menyusun program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Manfaat Akademik

Manfaat akademik dari penelitian ini adalah sebagai referensi dan rujukan ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik mengkaji topik serupa di bidang ekonomi pembangunan dan pembangunan manusia. Penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya dengan periode waktu, wilayah, maupun variabel yang berbeda. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah literatur ilmiah, khususnya mengenai determinan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

